

Proyek IKN Diaudit BPK



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,23/02/2024

NUSANTARA, TRIBUN – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (21/2/2024).

Mendampingi proses audit¹ Anggota IV BPK RI Haerul Saleh, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki menuturkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 74,87 persen. Menurutnya, pembangunan IKN sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih *on schedule*,” kata Basuki.

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Di antaranya proyek konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Selain itu, beberapa waktu lalu sudah dilakukan empat seri *groundbreaking* oleh Presiden Joko Widodo. “Misalnya gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Hari ini kami hadir lengkap bersama para Dirjen. Kami juga menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik,” tutur Basuki.

Kegiatan audit BPK tersebut diawali dari Kota Balikpapan melewati jalan tol akses IKN menuju jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN. Selanjutnya menuju KIPP dengan meninjau Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi.

Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menerangkan, pembangunan IKN terbagi menjadi dua *batch* hingga akhir tahun 2024.

Konstruksi untuk *batch* 1 yang telah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan menunjukkan *progress* fisik 74,87 persen per 15 Februari 2024. Sementara untuk *batch* 2, telah berjalan 49 paket pekerjaan dengan *progress* 24 persen. Untuk keseluruhan 89 paket berjalan, anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp68,57 triliun.

Dalam konteks persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus di kawasan IKN, hampir semua infrastrukturnya masuk *batch* 1. "Misalnya, gedung kantor presiden, istana negara, dan lapangan upacara sudah mencapai 56,37 persen. Sementara kantor presiden sendiri sudah mencapai 74,94 persen," ungkap Danis.

Selanjutnya untuk pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju IKN, saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer dengan *progress* 70,9 persen. Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 4 sepanjang 7,3 kilometer dengan *progress* 70 persen, dan seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 kilometer dengan *progress* 77,8 persen.

Di samping *batch* 1 juga sedang dikerjakan *batch* 2. Salah satu yang cukup strategis, adalah pembangunan 47 *tower* hunian untuk ASN, TNI, dan Polri. "Khusus untuk persiapan upacara 17 Agustus 2024, *insyaallah* pada bulan Juli 2024 mendatang, 12 *tower* hunian selesai dan dilengkapi *furniture* untuk langsung digunakan," tambah Danis. **(kps)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Proyek IKN Diaudit BPK, 23/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Perpres 75/2024), ibu kota negara bernama nusantara yang selanjutnya disebut ibu kota nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Perpres 75/2024 bahwa kawasan inti pusat pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari wilayah kota di

kawasan perkotaan inti kawasan strategis nasional ibu kota nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional.

3. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres 75/2024 diatur bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan ibu kota nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/audit>, audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala.